

Sosialisasi dan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Millennial dalam Politik dan Kebijakan Publik

Aenal Fuad Adam^{1*}, Syahrabudin Husein Enala², Fransin Kontu³, Muhammad Novan Prasetya⁴
^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus Merauke

E-mail: ¹adam@unmus.ac.id

Abstrak

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah (1) Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya politik kewarganegaraan bagi generasi milenial kota Merauke, (2) Generasi Milenial belum sepenuhnya memahami pentingnya partisipasi politik yang berdampak pada kemajuan system politik dan demokrasi di tingkat lokal (3) Generasi milenial belum memahami secara kompeherensif pentingnya pengetahuan, sikap, norma, nilai dan perilaku partisipasi dalam kehidupan politik (4) Generasi Milenial belum efektif dalam memahami pentingnya partisipasi dan kesadaran politik demi kemajuan kehidupan politik. Dari hasil penelusuran melalui observasi dan proses diskusi dengan mitra pada akhirnya melahirkan sebuah solusi yang akan ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra yaitu melalui sosialisasi, penyuluhan, dan transmisi pengetahuan politik dalam peningkatan partisipasi dan kesadaran politik bagi generasi milenial. Target yang akan dicapai setelah program PKM adalah (1) Peningkatan pengetahuan generasi milenial dalam peningkatan partisipasi dan kesadaran politik (2) Peningkatnya kesadaran dan pengetahuan politik generasi milenial (3) Munculnya sikap, nilai, norma dan perilaku generasi milenial yang sadar akan kehidupan politik. Pelaksanaan program PKM diaplikasikan dengan kegiatan non fisik meliputi sosialisasi sebagai media transfer informasi pengetahuan dan teknologi sehingga terjadi peningkatan kualitas dan efektifitas dalam peningkatan politik kewarganegaraan dalam peningkatan partisipasi dan kesadaran politik generasi milenial.

Kata kunci: sosialisasi politik, kewarganegaraan, partisipasi, kesadaran politik, generasi milenial.

Abstract

The problems faced by partners are (1) Lack of knowledge about the importance of citizenship politics for the millennial generation in Merauke, (2) Millennials do not fully understand the importance of political participation which has an impact on the progress of the political system and democracy at the local level (3) Millennials do not understand comprehensively the importance of knowledge, attitudes, norms, values and behavior of participation in political life (4) The Millennial Generation has not been effective in understanding the importance of political participation and awareness for the advancement of political life. From the search results through observation and discussion processes with partners, finally a solution will be offered to solve the problems faced by partners, namely through socialization, counseling, and transmission of political knowledge in increasing political participation and awareness for the millennial generation. The targets to be achieved after the PKM program are (1) Increased knowledge of the millennial generation in increasing political participation and awareness (2) Increased political awareness and knowledge of the millennial generation (3) The emergence of attitudes, values, norms and behavior of the millennial generation who are aware of political life. The implementation of the PKM program is applied to non-physical activities including socialization as a medium for transferring information, knowledge and technology so that there is an increase in quality and effectiveness in increasing citizenship politics in increasing participation and political awareness of the millennial generation.

Keywords: political socialization, citizenship, participation, political awareness, millennial generation.

1. PENDAHULUAN

Demokrasi akan dapat berjalan ketika meningkatnya aktivitas partisipasi politik warga negara. Tingginya tingkat partisipasi politik bisa dikatakan menjadi kunci utama dari sistem politik [1]. Tetapi, bukan hanya soal partisipasi politik saja, namun yang perlu ditingkatkan juga hadirnya kesadaran kritis warga negara agar tercapai sebuah system politik yang demokratis, berdaulat dan berkualitas agar tegaknya pemerintahan yang kuat (*strong government*). Di era saat ini, hantaman gelombang bonus demografi menerpa Indonesia yang mengubah struktur umur penduduk yang ditandai dengan tingginya jumlah usia produktif dan menurunnya jumlah usia non-produktif. Fenomena membuka peluang hadirnya generasi milenial sebagai generasi memberikan sumbangan terbentuknya struktur piramida kependudukan dengan usia yang bisa dibilang cukup produktif [2]. Dapat dikatakan generasi milenial akan berperan besar, memiliki kendali atas pembangunan ekonomi, politik dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Di provinsi Papua, jumlah generasi milenial sebanyak 1.196.000 jiwa yang tersebar di perkotaan maupun perdesaan [3]. Namun masalahnya adalah rendahnya melek informasi, sosial dan politik mengakibatkan generasi milenial Papua mengalami ketertinggalan dengan provinsi – provinsi lainnya [4]. Sementara di Kota Merauke, jumlah generasi milenial sebanyak 125.349 jiwa sebagai salah satu generasi produktif yang memiliki peran besar kemajuan pembangunan dan perekonomian [5]. Hasil penelusuran tim PKM melakukan observasi menemukan generasi milenial Kota Merauke yang dipandang sebagai generasi produktif, kritis dan melek literasi. Pada kenyataannya kondisi ini sangat berbanding terbalik dimana sebagian besar dari mereka kurang memahami posisi mereka sebagai actor perubahan (*agen of change*) yang memiliki sikap *a*-politik. Dalam artian sikap dan nilai – nilai yang terbentuk dalam diri milenial Merauke masih belum punya kesadaran terhadap pentingnya keterlibatan warga negara (*civic engagement*) merespons seluruh aktivitas politik negara. Di sisi lain, jumlah aktivisme partisipasi politik semakin rendah yang disebabkan rendahnya pengetahuan dan sikap apatis terhadap kehidupan politik [6].

Dari wawancara tim PkM, menemukan rendahnya tingkat partisipasi dan literasi politik menjadi penyebab keengganan generasi milenial untuk terlibat dan ikut serta dalam aktivitas – aktivitas politik untuk dapat mempengaruhi system politik. Dengan demikian, tim PkM memberikan partisipasi penuh untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi generasi milenial Merauke. Tujuannya adalah terwujudnya perubahan radikal atas sikap, nilai dan tatanan pola pikir generasi milenial. Melalui sosialisasi politik dan literasi diharapkan terjadinya peningkatan partisipasi politik dan kesadaran kritis generasi milenial. Semua itu demi terbentuknya karakter generasi milenial yang produktif, dan memiliki sikap adanya kesadaran terhadap situasi sosial politik demi terwujudnya system politik yang demokratis.

Partisipasi secara harfiah menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti turut berperan serta pada suatu kegiatan. Partisipasi dapat juga diartikan sebagai keterlibatan individu dalam proses interaksi sosial yang berada di masyarakat dengan kesadaran secara nyata tanpa perasaan terpaksa dan bertanggung jawab. Dalam arti luas berpolitik mempunyai pengertian menjalankan politik, sedangkan politik berarti melaksanakan interaksi antar manusia dengan mengandalkan kekuasaan yang dimiliki untuk selanjutnya ditransfer kepada orang lain dan dimanfaatkan dalam kegiatan bersama [7]. Politik memiliki arti menjalankan politik yang seluas-luasnya, sedangkan politik berarti melakukan interaksi antar manusia dengan mengandalkan kekuasaan yang dimiliki, untuk selanjutnya dialihkan kepada orang lain dan digunakan dalam kegiatan bersama [8]. Bentuk implementasi politik di kalangan anak muda dapat dilihat dari tingkat partisipasi politik dalam berbagai kegiatan, seperti penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif, pemilihan ketua di kelurahan atau badan perwakilan mahasiswa, serta perhatian khusus terhadap semua pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Saat ini kaum muda atau milenial memiliki tingkat partisipasi politik yang sangat rendah [2]. Milenial sebagai agen perubahan tidak mampu menggunakan kemampuan berpikirnya untuk

mencoba menggali lebih jauh bahwa kebijakan implementasi adalah bagian terpenting dalam mengarahkan kehidupan. Sebagai kontrol sosial, generasi milenial juga tidak mampu menunjukkan wujud nyata dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada masyarakat yang terkena dampak dari dikeluarkannya kebijakan publik. Kebijakan publik tidak terlepas dari kepentingan banyak pihak, sehingga dalam kebijakan publik juga tidak terlepas dari aktivitas politik. Kebijakan publik secara sederhana dapat diartikan sebagai keputusan pemerintah untuk melaksanakan tujuan yang telah direncanakan agar mengarah pada perubahan yang diharapkan [9]. Generasi milenial diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis dan selalu berpikir sistematis dalam kaitannya dengan politik. Oleh karena itu, mereka selalu diberikan latihan-latihan studi kasus untuk memberikan pemahaman kepada generasi milenial tentang berbagai permasalahan yang ada di masyarakat dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

2. METODE

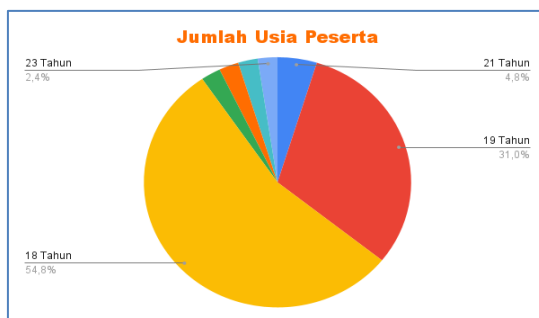
Dalam kegiatan ini, metode yang digunakan adalah sosialisasi dan pelatihan. Secara umum, model sosialisasi dan Pelatihan dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Pelatihan muncul dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang diterapkan di lembaga tertentu dalam kaitannya dengan kebutuhan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian, tujuan, dan tantangan lainnya. Secara umum model pelatihan disusun dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seseorang. Seperti pada umumnya pelaksanaan kegiatan terkait dengan kebutuhan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian, tujuan, dan hambatan lainnya. Sosialisasi dan pelatihan pada kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama 6 (enam) hari, pada tanggal 19 dan 24 September 2022 di Sekretariat IKAMI SUL- SEL, dengan jumlah peserta sebanyak 55. Sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan oleh Syahrabudin Husein Enala, S.Sos., M.A.P, Muhammad Novan Prasetya, M.H.I dan Fransin Kontu, S.IP., M.Si dan Aenal Fuad Adam M.A. Latihan - latihan meliputi pre-test, materi, dan post-test. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam dari peserta pelatihan. Proyek pengabdian masyarakat ini menciptakan wadah bagi generasi milenial untuk belajar tentang politik kewarganegaraan. Salah satu perannya adalah memahami posisi mereka sebagai citizen community yaitu memberikan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat yang terkena dampak kebijakan daerah dan memantau kebijakan yang dikeluarkan daerah serta pentingnya partisipasi dalam demokrasi.

Luaran dari pengabdian ini adalah terbentuknya wadah bagi generasi muda dalam proses pembelajaran melalui pembentukan karakteristik sikap kritis dan salah satunya adalah memiliki kapasitas intelektual untuk mendalami politik, yang merupakan komponen terpenting dari pemuda tidak mampu memberikan perlindungan dan dukungan kepada masyarakat yang dirugikan dengan pelaksanaan program pemerintah. Perbedaan kepentingan berbagai pihak tidak bisa dilepaskan dari kebijakan publik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaannya, materi yang diberikan kepada peserta diperluas tidak hanya pada pendidikan politik, tetapi juga pada partisipasi politik mahasiswa. Indonesia umumnya memiliki masalah dengan literasi dan pendidikan politik. Penyelenggara pemilu perlu terus mengupdate program literasi politik bagi masyarakat, khususnya bagi anak muda usia 17-35 tahun. Pendidikan politik secara umum merupakan upaya agar setiap warga negara terlibat secara kritis dalam politik dengan membekali diri dengan keterampilan dan kemampuan politik. Oleh karena itu, ketika warga negara berpartisipasi dalam politik, baik partisipasi politik formal seperti pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah atau bentuk partisipasi politik lainnya, harus dilakukan dengan keterampilan politik yang sesuai. Berikut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat:

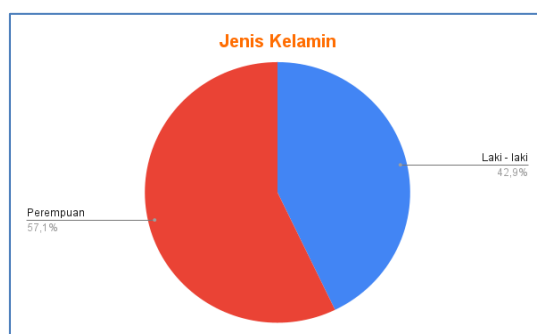
Kegiatan awal yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat adalah melakukan *mapping* awal, tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah sampel dan usia peserta.



Grafik 1. Perbandingan Usia Peserta

Melihat dari hasil penelusuran, bahwa peserta yang mengikuti kegiatan dengan usia 18 tahun mencapai 54.8%, sebesar 30 orang, usia 19 tahun sebesar 30%, usia 21 tahun sebesar 4.8% dan usia 23 sebesar 2.4%.

Sementara untuk jenis kelamin peserta didominasi oleh jenis kelamin perempuan dengan jumlah 32 atau 57% dan laki – laki sebanyak 23 orang atau 43%.



Grafik 2. Perbandingan Jenis Kelamin Peserta

3.1. Peran Sosialisasi politik bagi warganegara

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari senin 19 september 2022, yang mana sasaran dari sosialisasi ini langsung memberikan pemahaman terkait dengan sosialisasi melalui pemberian pendalaman materi mengenai pentingnya sosialisasi politik bagi generasi muda saat ini. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kognitif dan afektif para peserta dimulai dengan memberikan penjelasan definisi sosialisasi politik dan implikasinya terhadap demokrasi dan kebijakan publik di masa datang.



Gambar 1. Materi Sosialisasi Politik

Kegiatan ini dimulai dengan memberikan pemahaman dimulai memberikan penjelasan tentang definisi sosialisasi politik yang dimaknai sebagai "proses membentuk, mempertahankan, dan mengubah budaya politik." Sosialisasi politik adalah proses pengembangan budaya politik

masyarakat, yang melibatkan penanaman nilai-nilai politik. Dalam pendidikan Indonesia, misalnya, konsep kebhinekaan diajarkan dan ditanamkan sejak dini karena pengajaran dan penanaman nilai. Pancasila dihargai sebagai hasil dari proses sosialisasi politik masyarakat luas. Hal ini menunjukkan proses pengenalan dan peningkatan nilai-nilai politik, yang pada akhirnya menjadi orientasi politik dan membantu individu dalam memahami peran masyarakat dalam sistem politik yang stabil dan tahan lama.

Selanjutnya pemateri memberikan penjelasan bahwa sosialisasi politik dan pendidikan politik adalah upaya untuk melestarikan atau mengubah budaya politik suatu masyarakat. Sosialisasi politik merupakan proses dimana suatu masyarakat mewariskan budaya politiknya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui transfer nilai, ide, sikap, dan terutama perilaku politik, kegiatan ini memfasilitasi pembentukan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya yang ingin dilestarikan atau diubah. Sehingga sosialisasi politik menjadi proses di mana seorang individu dapat memahami sistem politik, yang kemudian membentuk sifat persepsi dan tanggapan politiknya terhadap fenomena politik.

Selanjutnya, pemateri menjelaskan bahwa sosialisasi politik memerlukan evaluasi lingkungan budaya masyarakat, lingkungan politik, dan lingkungan sosial. Individu juga menyelidiki sikap politik dan evaluasi politiknya. Kaitan paling mendasar antara sistem sosial dan politik adalah sosialisasi politik, tetapi setiap sistem bisa sangat berbeda. Dari perspektif politik tertentu, sosialisasi politik adalah proses yang panjang dan rumit yang dihasilkan dari interaksi antara kepribadian individu dan pengalaman politik mereka yang relevan. Sehingga peserta memahami sosialisasi politik sebagai sarana untuk mendidik individu tentang pengertian dan evolusi politik serta cara yang benar untuk terlibat dalam politik. Sosialisasi politik berupaya menginformasikan kepada warga, khususnya yang telah memiliki hak pilih, tentang pentingnya politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tercapainya sosialisasi politik akan mendorong partisipasi antar individu. Dalam aksi atau proses sosialisasi politik, informasi dapat disampaikan melalui agen atau sarana berikut: keluarga, sekolah, kelompok sosial, pekerjaan, media massa, dan kontak politik langsung.

3.2. Sosialisasi urgensi dari pentingnya Partisipasi Politik bagi generasi muda

Kegiatan selanjutnya pada tanggal 20 September 2022, materi dengan bahasan peran partisipasi politik bagi generasi milenial. Partisipasi politik merupakan keterampilan penting dan merupakan bagian integral dari masyarakat saat ini. Dalam arti luas, “politik” mengacu pada penyelenggaraan politik serta hubungan interpersonal yang didasarkan pada transfer dan penerapan kekuasaan [7]. Hal ini sesuai dengan asal kata “politik” yang dalam bahasa Yunani adalah polis dan berarti negara kota [10]. Bentuk administrasi politik bagi generasi milenial dapat ditentukan oleh tingkat partisipasi politik dalam berbagai kegiatan, seperti penyelenggaraan pemilihan umum, baik legislatif maupun eksekutif, pemilihan ketua dalam suatu komunitas atau organisasi kemahasiswaan, dan perhatian yang besar terhadap semua kebijakan pemerintah. Akibatnya, hanya sebagian kecil milenial yang aktif secara politik. Generasi milenial dapat dianggap sebagai agen perubahan, tetapi mereka tidak memiliki kapasitas intelektual untuk masuk lebih dalam ke penerapan politik, yang merupakan komponen terpenting dari manajemen kehidupan. Sebagai kontrol sosial, remaja belum mampu memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat yang dirugikan oleh pelaksanaan program negara. Perbedaan kepentingan berbagai pihak tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik. Oleh karena itu terkait erat dengan keterlibatan politik dalam kebijakan publik.

Sehingga dalam kegiatan ini, dilakukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam pentingnya partisipasi politik yang mana secara konseptual partisipasi merupakan kegiatan warga negara yang bersifat voluntaris (sukarela) yang mengambil bagian dalam proses pemilihan pergantian kekuasaan yang pada gilirannya membentuk kebijakan umum. Selanjutnya, Tim PkM memberikan pemahaman bahwa partisipasi merujuk pada aktivitas warga negara (pemilih) untuk mempengaruhi outcomes (hasil akhir) dari proses politik sesuai dengan prosedur, misalnya pemungutan suara untuk menentukan bakal calon untuk menduduki jabatan politik dan mengikuti

kampanye politik. Sementara kegiatan lain adalah dapat dilihat dengan mengukur empat unsur yaitu pemungutan suara, aktivitas kampanye, aktivitas masyarakat dan menghubungi pejabat publik.



Gambar 2. Materi Partisipasi Politik

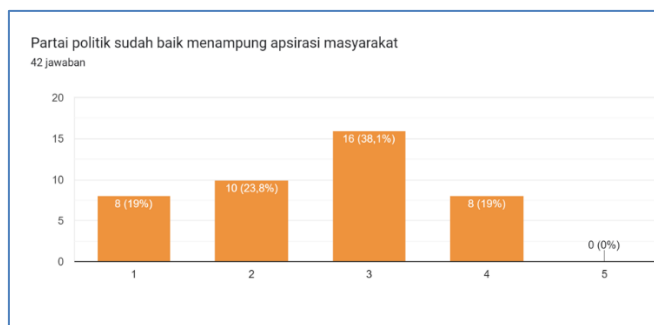
3.3. Monitoring hasil sosialisasi.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 september 2022, dilakukan untuk mengukur sejauhmana hasil dari sosialisasi yang dilakukan memiliki dampak terhadap peserta sebagai cara untuk mengukur kemampuan kognisi, afektif dan evaluatif. Unsur kognisi disini mencakup pengetahuan dan keyakinan politik, misalnya mendorong pengetahuan warga negara mengenal rekam jejak dan mengetahui visi – misi bakal calon. Unsur afektif mencakup sikap dan nilai terhadap keadaan atau proses politik, misalnya mendorong warga negara aktif dalam merespons informasi politik terkait dengan kegiatan pemilu. Terakhir unsur evaluatif merujuk pada sikap moralitas dalam merespon proses politik, misalnya memberikan pemahaman kepada warga negara agar mampu menyaring informasi politik untuk menghindari opini dan informasi – informasi yang tidak benar (hoax).



Gambar 3. Grafik Perbandingan Pemilih

Dilihat dari unsur kognisi disini, bahwa hasil test, dominan para peserta memilih sangat setuju (5) sebesar 54,8% untuk mengetahui rekam jejak calon pemimpin politik. Sementara yang memilih setuju (4) 35.7%, memilih netral (5) sebesar 4.8%, memilih kurang (2) 0%, dan memilih tidak setuju 4.8%.



Gambar 4. Grafik Respon Partai Politik Tentang Aspirasi Rakyat

Sementara simulasi tentang pemahaman tentang politik terlihat bahwa peserta lebih terlihat ragu – ragu, dimana peserta yang memilih sangat setuju (5) 0%, peserta yang memilih setuju (4) sebesar 19%, yang memilih ragu – ragu atau Netral (3) sebesar 38%, peserta yang memilih kurang (2) sebesar 24% sedangkan peserta yang memilih tidak setuju (1) sebesar 19%. Dalam simulasi untuk mengukur unsur afektif mencakup sikap dan nilai terhadap keadaan atau proses politik, para peserta telah menunjukkan hasil yang signifikan dimana persepsi tentang penggunaan hak pilih merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara para peserta memilih sangat setuju (SS) sebesar 54%, setuju (S) 33%, Netral atau ragu – ragu (2,4%), tidak setuju (TS) sebesar 2%.



Gambar 5. Grafik Pemahaman Politik Peserta

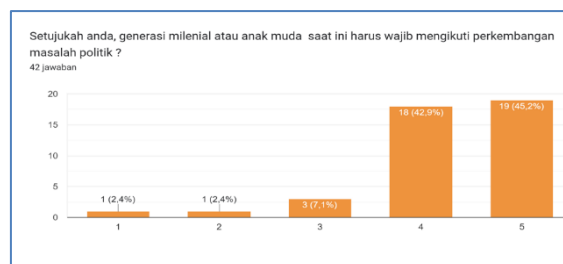
Melihat hasil dari simulasi ini menunjukkan bahwa peserta kegiatan setelah mendapatkan sosialisasi yang berimbang pada memahami arti, peran dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam proses politik. Hal ini menandakan bahwa proses sosialisasi bisa dikatakan berhasil dan berdaya.



Gambar 6. Grafik Pemahaman Peserta Setelah Sosialisasi

Sedangkan simulasi persepsi peserta tentang partisipasi menunjukkan peserta bersikap ragu – ragu terhadap situasi dan kondisi partisipasi saat ini. Hal ini ditandai dengan jumlah ragu – ragu (3) sebesar 61%, Setuju (4) sebesar 26%, Sangat Setuju (5) sebesar 4.8%. berdasarkan hasil tersebut menunjukkan simulasi ini memberikan gambaran bahwa sosialisasi bisa dikatakan berdaya dan berjalan baik. Sedangkan unsur evaluatif tergambar bahwa nilai rata – rata peserta menunjukkan hal yang positif dimana nilai sangat setuju (5) sebesar 45%, setuju (4) 42%.

Berdasarkan hal tersebut mana proses evaluasi dan monitoring menunjukkan hasil yang signifikan yang berimplikasi terhadap peningkatan kemampuan kognisi, afektif dan evaluative para peserta kegiatan.



Gambar 7. Grafik Partisipasi Politik Peserta

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Diakhir kegiatan ini disimpulkan bahwa kegiatan ini efektif meningkatkan kemampuan kognisi, afektif dan evaluative. Sosialisasi dapat dijadikan pilihan sebagai metode edukasi dan penanda Baru peningkatan partisipasi politik. Dalam upaya meningkatkan aktivitas milenial dalam politik pemilu bukanlah hal yang mudah. Tentunya perlu memiliki strategi dalam meningkatkan kesadaran politik warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dan sukarela dalam menentukan proses politik. Diperlukan desain strategis untuk meningkatkan kesadaran politik milenial, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah pemerintahan yang demokratis.

Dalam upaya memperkuat literasi politik, diperlukan membentuk dan membangun jejaring partisipatif dengan melibatkan institusi formal maupun informal. Jejaring partisipatif tersebut adalah mereka yang memiliki tautan dengan aktivitas warga negara. Jejaring partisipatif tersebut seperti civil society, kelompok profesional, komunitas masyarakat, institusi pendidikan yang dianggap dapat berperan sebagai agensi yang memberi pemahaman arti pentingnya kesadaran politik. Jejaring inilah yang akan bekerja mengartikulasikan kepentingan umum dalam meningkatkan kesadaran politik warga negara yang mana jejaring ini bekerja menyelenggarakan pendidikan pemilu untuk mendorong aktivitas warga negara dalam meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran akan hak politik warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. F. Adam, "Menegakkan Partisipasi Pemilih , Memperkuat Literasi Politik," *Bumi Sultra News*, pp. 1–6, 2018.
- [2] M. T. A. Rahimallah, A. F. Adam, and F. A. Sudirman, "Orientasi Politik Kelas Milenial Dalam Pemilihan Gubernur : Sebuah Catatan Survey," vol. 10, no. 2, pp. 71–83, 2019.
- [3] BPS Provinsi Papua, *Provinsi Papua Dalam angka 2020*. 2020.
- [4] BPS Indonesia, *Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018.
- [5] BPS, "BPS Papua." 2020.
- [6] reportasenews.com, "Partisipasi Pemilih Pilgub di Kabupaten Merauke Capai," 2018.
- [7] A. Arifin, S. Sunarto, and H. Cahyono, "Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Mahasiswa Prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018," *Edupedia*, vol. 2, no. 2, p. 123, 2018, doi: 10.24269/ed.v2i2.144.
- [8] S. Muadi, Ismail, and A. Sofwani, "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik," *J. Rev. Polit.*, vol. 6, no. 2, pp. 195–224, 2016.
- [9] R. Surbakti, *Penanganan Pelanggaran Pemilu Penanganan Pelanggaran Pemilu*. 2011.
- [10] R. Wirawan, Mardiyono, and R. Nurpratiwi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah," *JISIP J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 4, no. 2, pp. 1–87, 2015.